

ARTIKEL JURNAL

Muhamad Arvip

email : arvipm@gmail.com

Program Studi Magister Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura

Analisis Pengaruh Belanja Infrastruktur Pekerjaan Umum Terhadap Tenaga Kerja Yang Terserap dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2011-2015

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the effects of the public works infrastructure expenditure on labor absorption and economic growth in Indonesia in 2011-2015. The study had been conducted for five years from 2011 to 2015 by using secondary data provided by the Ministry of Public Works and Public Housing, and Central Bureau of Statistics in the form of combination between times series data (from 2011 to 2015) and cross-sectional data (33 province in Indonesia) which also known as panel data.

The hypothesis was examined by using fixed effects model from EViews statistics application. The test result shows the level of significance $\alpha = 0,05$. The result shows that first, the government expenditure on water resources division has a positive and significant effect on labor absorption and economic growth. Second, the government expenditure on Bina Marga division has a negative and not significant effect on labor absorption but has a positive and not significant effect on economic growth. Third, the government expenditure on Cipta Karya division has a positive and significant effect on labor absorption but a negative and significant effect on economic growth. Fourth, labor absorption has a positive and significant effect on economic growth.

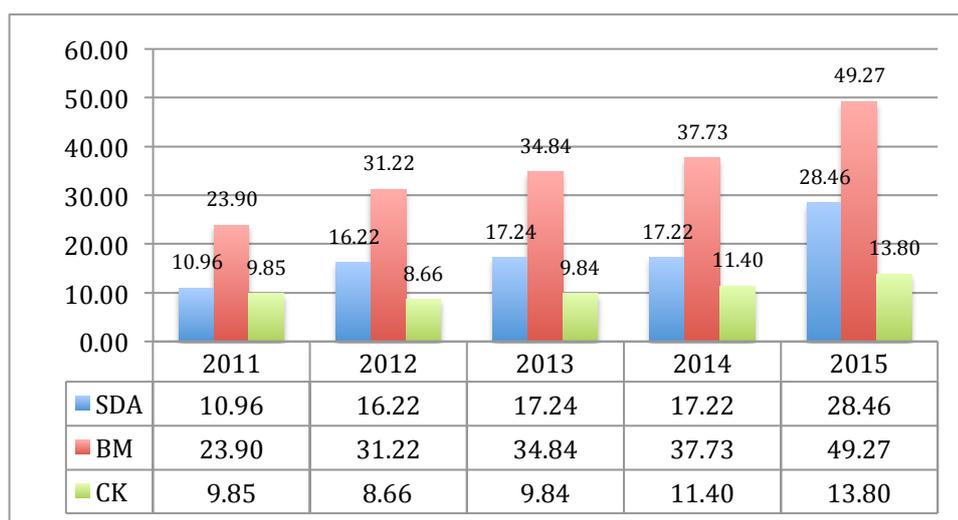
Keyword : Public Works Infrastructure, Water Resources Division, Bina Marga Division, Cipta Karya Division, Labor Absorption, and Economic Growth.

1. Latar Belakang

Semangat yang diperlihatkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo akhir-akhir ini untuk membangun infrastruktur di Indonesia sangatlah menggebu-gebu. Namun pertanyaannya apakah dengan anggaran atau dana yang relatif besar untuk membangun infrastruktur itu mempunyai dampak yang positif

dan signifikan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proyek infrastruktur adalah proses pembangunan yang berimplikasi jangka panjang. Paling tidak baru mempunyai efek sampai 25-30 tahun kedepan sebagai penyangga pertumbuhan ekonomi. Memang infrastruktur memiliki elastisitas tertinggi sebagai pengungkit investasi dan daya saing. Grafik 1 memperlihatkan jumlah pengeluaran pemerintah melalui belanja modal infrastruktur pekerjaan umum yang terdiri dari infrastruktur bidang Sumber Daya Air (SDA), infrastruktur bidang Bina Marga (BM), dan Cipta Karya (CK).

Grafik 1



Sumber : PUSDATIN, KemenPUPR – Jakarta (diolah)

Ketersediaan akan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, sistem penyediaan tenaga listrik, irigasi, sistem penyediaan air bersih, sanitasi, bendungan, dan sebagainya, merupakan *social overhead capital*, memiliki keterkaitan yang sangat kuat dan erat dengan perkembangan wilayah, antara lain dicirikan dengan laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan yang ada, bahwa daerah yang mempunyai kelengkapan sistem infrastruktur yang lebih baik, mempunyai tingkat laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik jika dibandingkan dengan daerah yang mempunyai kelengkapan infrastruktur yang terbatas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyediaan infrastruktur merupakan faktor kunci dalam mendukung pembangunan wilayah (Kirmanto, 2005). Untuk itu anggaran belanja infrastruktur telah diprioritaskan oleh pemerintah pengalokasiannya dalam APBN maupun APBD. Diharapkan dengan cara tersebut pengangguran dapat teratasi, atau paling tidak dapat dikurangi, serta infrastruktur-infrastruktur perekonomian yang diperlukan untuk menggerakkan sektor riil bisa ditingkatkan lebih baik lagi (Vibiz Regional Research, 2008).

Studi Bank Dunia (2015) dan Global Mckinsey (2013) menunjukkan kondisi infrastruktur Indonesia masih jauh dari kondisi ideal bahkan cenderung memburuk. Menurut *Global Competitiveness Report* (2017-2018), posisi peringkat kualitas infrastruktur Indonesia dari posisi 60 meningkat menjadi posisi 52 dari 137 negara. Sedangkan daya saing hanya mencapai posisi 36 dari sebelumnya posisi 41, hal ini disebabkan karena peringkat infrastruktur Indonesia masih belum meningkat. Masih jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan negara tetangga Singapura, Malaysia dan Thailand. Ini artinya kondisi infrastruktur Indonesia masih harus ditingkatkan lagi kualitasnya. Pengalaman negara lain juga menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi kunci untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berbagai literatur juga menunjukkan pembangunan infrastruktur mampu meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya produksi, dan menciptakan lapangan kerja. Pembangunan infrastruktur juga terbukti dapat mendorong berkembangnya sektor lain dan mampu meningkatkan informasi dan akses pasar.

Studi Dana Moneter Internasional (2014), menunjukkan kenaikan investasi infrastruktur publik akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, baik jangka pendek maupun jangka menengah. Satu persen kenaikan investasi infrastruktur publik di negara berkembang akan meningkatkan output sebesar 0,1 persen pada tahun tersebut dan 0,25 persen empat tahun kemudian. Hasil simulasi dengan menggunakan model *Interregional Input-Output* (IRIO, 2010), untuk tiga jenis infrastruktur listrik, transportasi, dan pengairan pada tahap konstruksi pada tahun 2017 ternyata mampu menciptakan nilai tambah terhadap perekonomian dan dapat mengangkat pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen. Dan juga berhasil mendorong sektor industri pengolahan dan distribusi. Setiap aspek kehidupan sosial maupun ekonomi mempunyai infrastruktur sendiri, yang merupakan satuan terbesar dan alat utama dalam berbagai kegiatan. Oleh karena itu, infrastruktur perlu dipahami sebagai dasar-dasar dalam mengambil kebijakan (Kodoatie, 2005).

Todaro dan Smith (2011: 18) pembangunan haruslah dipandang sebagai proses multidimensi yang melibatkan berbagai perubahan mendasar dalam struktur sosial, sikap masyarakat dan lembaga nasional serta percepatan pertumbuhan, pengurangan ketimpangan dan penanggulangan kemiskinan. Pembangunan seharusnya merupakan suatu upaya untuk mengubah kondisi kehidupan dari yang sebelumnya tidak memuaskan menjadi lebih baik. Pertumbuhan ekonomi yang baik tidak akan tercapai jika tidak diimbangi dengan proses pembangunan yang terarah, akuntabel dan berkesinambungan. Todaro dan Smith (2011: 226) juga menjelaskan bahwa tingkat ketersediaan infrastruktur di suatu negara adalah faktor penting dan menentukan bagi tingkat kecepatan dan perluasan pembangunan ekonomi.

Infrastruktur memainkan peran penting dalam mempromosikan dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Infrastruktur yang dirancang dengan baik juga bisa membuat pertumbuhan menjadi lebih inklusif dengan berbagi manfaat terhadap kelompok-kelompok dan masyarakat miskin, terutama dapat menghubungkan daerah-daerah terpencil dan negara-negara kecil ke pusat-pusat bisnis utama (Bhattacharyay, 2010).

Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah tidak dapat terlepas dari ketersediaan infrastruktur yang ada pada daerah tersebut. Hal ini sesuai dengan beberapa studi atau penelitian sebelumnya. Pembangunan infrastruktur akan tetap menjadi fokus pemerintah, selain untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, perkembangan infrastruktur juga dapat memicu pertumbuhan ekonomi diberagam sektor lain. Berdasarkan simulasi Bappenas di Tahun 2017 setiap investasi Rp 126 miliar untuk pembangunan infrastruktur akan menciptakan nilai tambah Rp 146,9 miliar. Adapun kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi 1,06 persen.

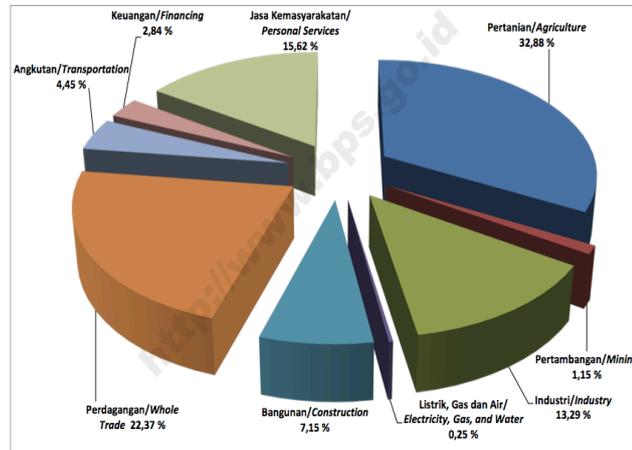
Sri Mulyani (2018) menyatakan bahwa infrastruktur merupakan penggerak atau stimulan perekonomian. APBN adalah merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk mencapai sasaran pembangunan, belanja pemerintah merupakan salah satu kebijakan fiskal yang diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan yang berkelanjutan. Adanya belanja infrastruktur diharapkan dapat mendorong investasi, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang prasarana atau infrastruktur pekerjaan umum, mempunyai tanggung jawab atas tersedianya infrastruktur pekerjaan umum yang dapat mendukung perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Jumlah anggaran untuk belanja infrastruktur yang di alokasikan ke daerah (provinsi) di Indonesia seperti digambarkan oleh grafik 2 dibawah ini.

Kementerian PUPR bertanggung jawab dalam penyediaan prasarana dan sarana irigasi, bendung, bendungan, rawa, pengamanan pantai, pengendalian banjir, jalan dan jembatan, drainase, sanitasi dan air bersih, serta permukiman, yang merupakan belanja modal infrastruktur pekerjaan umum yang diharapkan dapat menyerap tenaga kerja di sektor konstruksi dan konsumsi pemerintah. Pada grafik 3 menunjukkan prosentase sesuai lapangan pekerjaan, dimana untuk sektor konstruksi/bangunan menyerap tenaga kerja sebesar 7,15 %.

Grafik 2

Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Tahun 2011 - 2015



Sumber : BPS – diolah

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan judul penelitian ini, maka rumusan masalah dan tujuan serta pertanyaan penelitian ini adalah :

1. Apakah belanja modal infrastruktur pekerjaan umum bidang sumber daya air (X_1) berpengaruh terhadap tenaga kerja yang terserap (Y_1)?
2. Apakah belanja modal infrastruktur pekerjaan umum bidang bina marga (X_2) berpengaruh terhadap tenaga kerja yang terserap (Y_1)?
3. Apakah belanja modal infrastruktur pekerjaan umum bidang cipta karya (X_3) berpengaruh terhadap tenaga kerja yang terserap (Y_1)?
4. Apakah belanja modal infrastruktur pekerjaan umum bidang sumber daya air (X_1) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_2)?
5. Apakah belanja modal infrastruktur pekerjaan umum bidang bina marga (X_2) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_2)?
6. Apakah belanja modal infrastruktur pekerjaan umum bidang cipta karya (X_3) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_2)?
7. Apakah Y_1 berpengaruh terhadap (Y_2)?

2. Kajian Literatur

PDRB merupakan tolak ukur pertumbuhan ekonomi di daerah dan merupakan salah satu indikator yang dapat menggambarkan perkembangan perekonomian di daerah. PDRB dapat diukur dengan 3 (tiga) macam pendekatan, yaitu produksi, pendapatan, dan pengeluaran (Tambunan, 2003). Pendekatan pengeluaran

merupakan pendekatan dari sisi permintaan (*Aggregate Demand-AD*). Sedangkan pendekatan produksi dan pendekatan pendapatan, adalah pendekatan dari sisi penawaran agregat (*Aggregate Supply-AS*). PDRB berdasarkan pendekatan pengeluaran adalah merupakan jumlah dari semua komponen dari permintaan akhir, yaitu : Konsumsi Rumah Tangga, pembentukan modal sektor swasta atau investasi, konsumsi atau belanja pemerintah, dan ekspor *netto* (ekspor – impor). Belanja modal infrastruktur pekerjaan umum adalah merupakan pengeluaran agregat atau konsumsi dan investasi dari belanja atau pengeluaran pemerintah. Kenaikan pada belanja modal pemerintah ini, akan mendorong kenaikan konsumsi dan Investasi, dengan demikian akan dapat meningkatkan PDB/PDRB. Menurut Todaro dan Smith (2011:126/2) model pertumbuhan agregat menggambarkan pertumbuhan dari suatu perekonomian dalam satu atau sedikit sektor dengan menggunakan sejumlah variabel terbatas. Belanja pemerintah merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan belanja pemerintah dalam hal ini belanja modal infrastruktur pekerjaan umum akan dapat meningkatkan permintaan agregat pendapatan nasional serta kesempatan kerja.

Kuznets dalam Jhingan (2008) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dari kemampuan suatu negara untuk menyediakan berbagai jenis barang dan jasa kepada penduduknya, yang tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, penyesuaian kelembagaan dan ideologi yang diperlukannya. Atau dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai upaya peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa.

Menurut Todaro dan Stephen (2006), Sollow-Swan yang mengembangkan model pertumbuhan ekonomi, dan dikenal dengan model pertumbuhan Neo-Klasik, dengan asumsi: (1) tenaga kerja akan tumbuh dengan laju pertumbuhan tertentu, (2) adanya fungsi produksi yang berlaku di setiap periode, kemudian (3) adanya kecenderungan masyarakat yang menabung yang dinyatakan sebagai proporsi tertentu dari output. Model pertumbuhan ekonomi *Sollow* ini dirancang untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, tenaga kerja akan berinteraksi dalam perekonomian, serta bagaimana pengaruhnya terhadap output barang dan jasa suatu negara secara keseluruhan. Keynes menyarankan agar pemerintah meningkatkan pengeluaran dengan maksud untuk menstimulan perekonomian melalui kerja publik, karena kenaikan pengeluaran pemerintah (G), akan mendorong konsumsi (C), dan investasi (I), dan pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan nasional (Y).

Menurut Padmaliana (2015) teori pertumbuhan Neo-Klasik dapat diuraikan dalam suatu fungsi produksi *Cobb-Douglas*, dimana output merupakan fungsi dari

tenaga kerja dan modal. Sedangkan tingkat kemajuan teknologi merupakan variabel eksogen. Asumsi yang dipakai dalam model Neo-Klasik adalah adanya *constan return to scale*, yaitu adanya substitusi antara modal dan tenaga kerja dan adanya penurunan dalam tambahan produktivitas (*diminishing marginal productivity*). Sedangkan teori pertumbuhan endogen mengedepankan peran investasi dalam modal fisik dan modal manusia menentukan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sedangkan tabungan dan investasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan (Mankiw, 2000). Menurut Sukirno (2006) Teori pertumbuhan Neo-Klasik mempunyai banyak variasi, dan umumnya terdapat fungsi produksi yang pernah dikembangkan oleh dua ekonom Amerika, yaitu Charles Cobb dan Paul Douglas.

Teori Wagner menyatakan bahwa adanya keterkaitan positif antara pertumbuhan ekonomi dengan besarnya pengeluaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur (Purnomo 2009). Sekalipun dampak yang ditimbulkan dari penyediaan infrastruktur itu masih bersifat jangka panjang. Maskin (2005) menjelaskan bahwa untuk mengukur hasil pembangunan hanya dari sisi pertumbuhan ekonomi semata akan meniadakan terjadinya ketidakmerataan masyarakat dalam menikmati hasil pembangunan. Artinya yang diperlukan adalah pertumbuhan yang berkeadilan. Oleh karena itu belanja infrastruktur merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah untuk pembangunan merupakan salah satu jenis pengeluaran pemerintah termasuk proyek-proyek di daerah baik berupa biaya operasional dan pemeliharaan, maupun proyek-proyek pembangunan.

Penyerapan tenaga kerja menurut Badan Pusat Statistik adalah jumlah atau banyaknya orang yang bekerja di semua sektor ekonomi. Sedangkan kesempatan kerja adalah banyaknya orang yang dapat tertampung untuk bekerja pada suatu perusahaan. Kesempatan kerja ini akan bisa menampung semua tenaga kerja apabila lapangan pekerjaan yang tersedia mencukupi atau seimbang dengan banyaknya tenaga kerja yang ada. Menurut Todaro (2011), penyerapan tenaga kerja adalah diterimanya para pelaku tenaga kerja untuk melakukan tugas sebagaimana mestinya atau adanya suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya pekerja atau lapangan pekerjaan untuk diisi oleh pencari kerja. Dalam penelitian ini tenaga kerja yang diserap adalah tenaga kerja atau angkatan kerja yang terserap bekerja di sektor konstruksi atau bangunan. Kesempatan kerja mengandung pengertian bahwa tersedianya jumlah usaha produksi untuk memperkerjakan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam proses produksi, dan berarti mendapatkan pekerjaan atau adanya kesempatan kerja. Kesempatan kerja dapat tercipta apabila terjadi permintaan tenaga kerja di pasar kerja, dengan kata lain kesempatan kerja juga menunjukkan permintaan terhadap tenaga kerja (Sudarsono, 1998:28).

Perluasan kesempatan kerja merupakan suatu usaha untuk mengembangkan sektor-sektor penampungan kesempatan kerja dengan produktivitas rendah. Usaha perluasan kesempatan kerja tidak terlepas dari faktor - faktor seperti : pertumbuhan jumlah penduduk dan angkatan kerja, pertumbuhan ekonomi, tingkat produktivitas tenaga kerja, atau kebijakan pemerintah mengenai perluasan kesempatan kerja itu sendiri.

Belanja infrastruktur pekerjaan umum adalah bagian dari pengeluaran pemerintah dengan cara membelanjakan barang dan jasa di masyarakat berupa investasi sarana publik yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan berupa proyek-proyek pemerintah dengan menyerap kebutuhan tenaga kerja dengan jumlah tertentu. Penyerapan tenaga kerja dari sisi investasi pemerintah ini diharapkan dapat memberikan penghasilan dan menciptakan kemampuan daya beli masyarakat serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang terserap merupakan selisih antara jumlah angkatan kerja dengan tingkat pengangguran.

Todaro (2000) menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan tenaga kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produktivitas yang lebih tinggi, serta merupakan pangsa pasar domestik yang lebih besar pula. Meski demikian masih dipertanyakan apakah benar laju pertumbuhan yang cepat akan memberikan dampak positif atau negatif dari pembangunan ekonomi. Selanjutnya dikatakan bahwa pengaruh positif atau negatif dari pertumbuhan penduduk tergantung pada kemampuan sistem perekonomian daerah atau negara tersebut dalam menyerap tenaga kerja dan secara produktif memanfaatkan pertambahan tenaga kerja tersebut. Kemudian juga perlu ditopang dengan faktor penunjang lain, seperti kecakapan manajerial dan administrasi.

Dalam model sederhana tentang pertumbuhan ekonomi, pada umumnya pengertian tenaga kerja diartikan sebagai angkatan kerja yang bersipat homogen. Menurut Lewis (1954) dalam Todaro (2011:140), dengan model dua sektornya, bahwa surplus tenaga kerja dari sektor tradisional di transfer ke sektor industri modern yang pertumbuhannya menyerap kelebihan tenaga kerja, mendorong industrialisasi, dan menggerakkan pembangunan yang berkelanjutan. Penawaran tenaga kerja mengandung elastisitas yang tinggi. Dengan meningkatnya permintaan atas tenaga kerja akibat ekspansi kegiatan sektor modern, ini berarti tenaga kerja dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa teori perkembangan pengeluaran pemerintah yaitu : *Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah*. Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yaitu tahap awal, tahap menengah dan tahap

lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana atau infrastruktur seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi, irigasi, sanitasi. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin besar. Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah, oleh karena peranan swasta semakin besar akan menimbulkan banyak kegagalan pasar dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak.

Musgrave (1983) berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan, investasi swasta dalam prosentase terhadap PDB semakin besar dan prosentase investasi pemerintah terhadap PDB akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi lebih lanjut, Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah dalam pembangunan ekonomi beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Teori Adolf Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Intinya makin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Artinya apabila pendapatan perkapita meningkat, maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Meningkatnya pengeluaran pemerintah karena meningkatnya fungsi pertahanan keamanan dan ketertiban, kesejahteraan, perbankan, dan fungsi pembangunan.

Teori Peacock dan Wiseman didasarkan pada suatu analisis penerimaan pengeluaran pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan penerimaan pajak, padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar. Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Pengeluaran pemerintah termasuk instrumen penting kebijakan fiskal yang dapat memengaruhi tingkat pendapatan nasional, kesempatan kerja, tinggi rendahnya investasi nasional, dan distribusi penghasilan nasional. Kebijakan fiskal terdiri atas dua instrumen utama, yaitu : 1) kebijakan pajak, dan 2) pengeluaran pemerintah (Mankiw, 2003; Turnovsky, 1981). Kebijakan fiskal atau penganggaran memiliki tiga fungsi, yaitu : 1) fungsi alokasi, 2) fungsi distribusi, dan 3) fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi berhubungan dengan persediaan barang-barang sosial dan proses pemanfaatan sumber daya secara menyeluruh untuk produksi barang-

barang swasta, barang-barang sosial, dan kombinasi dari barang-barang sosial yang telah dipilih. Fungsi distribusi berhubungan dengan persamaan kesejahteraan dan distribusi pendapatan dalam masyarakat, dan Fungsi stabilisasi ditujukan untuk menstabilkan atau mempertahankan rendahnya tingkat pengangguran, harga atau tingkat inflasi, dan pertumbuhan ekonomi yang telah ditargetkan.

Menurut Keynes tingkat kegiatan dalam perekonomian ditentukan oleh pengeluaran agregat. Jika pengeluaran pemerintah meningkat maka permintaan agregat (AD) akan meningkat. Selain itu, peranan pengeluaran pemerintah (G) di negara berkembang sangat signifikan mengingat kemampuan sektor swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masih sangat terbatas, oleh karena itu peranan pemerintah sangatlah penting. Peningkatan permintaan agregat (AD) berarti terjadi pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi diukur dari PDB maka peningkatan pertumbuhan berarti peningkatan pendapatan (Mankiw, 2006)

Infrastruktur Pekerjaan Umum atau "*public works*" merupakan infrastruktur yang berkaitan dengan jalan (roads), saluran pembuangan dan sejenisnya pada sebuah kota atau wilayah tertentu (Ja'far 2007). Infrastruktur yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR merupakan infrastruktur penyedia pelayanan dasar dan infrastruktur merupakan salah satu sektor yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah.

Pengertian Infrastruktur menurut Grigg (1988) yakni infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Pengertian ini merujuk pada infrastruktur sebagai suatu sistem. Infrastruktur dalam sebuah sistem adalah bagian-bagian berupa sarana dan prasarana (jaringan) yang tidak terpisahkan satu sama lain. Infrastruktur juga merupakan bagian dari *capital stock* dari suatu negara, yaitu biaya tetap sosial yang langsung mendukung produksi (Setyaningrum 1997). Penelitian Aschauer (1989) menunjukkan bahwa infrastruktur secara signifikan mempengaruhi output.

Banyak literatur yang menyatakan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi sangat berhubungan erat. Pembangunan infrastruktur diyakini mampu menggerakkan sektor riil, menyerap tenaga kerja, meningkatkan konsumsi masyarakat dan pemerintah, serta memicu kegiatan produksi (Daroedono, 2004). Sektor infrastruktur dipahami secara luas sebagai *enabler* terjadinya kegiatan ekonomi produktif di sektor-sektor lain. Jika perekonomian merupakan "*mobil*", maka infrastruktur adalah "*roda*" nya yang memungkinkan "*mobil*" tersebut untuk bergerak.

Berdasarkan uraian tersebut maka infrastruktur yang merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan dapat dipandang sebagai lokomotif

pembangunan nasional dan daerah. Secara ekonomi makro ketersediaan dan jasa pelayanan infrastruktur mempengaruhi *marginal productivity of private capital* sedangkan dalam konteks ekonomi mikro ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur berpengaruh terhadap pengurangan biaya produksi (Haris, 2005).

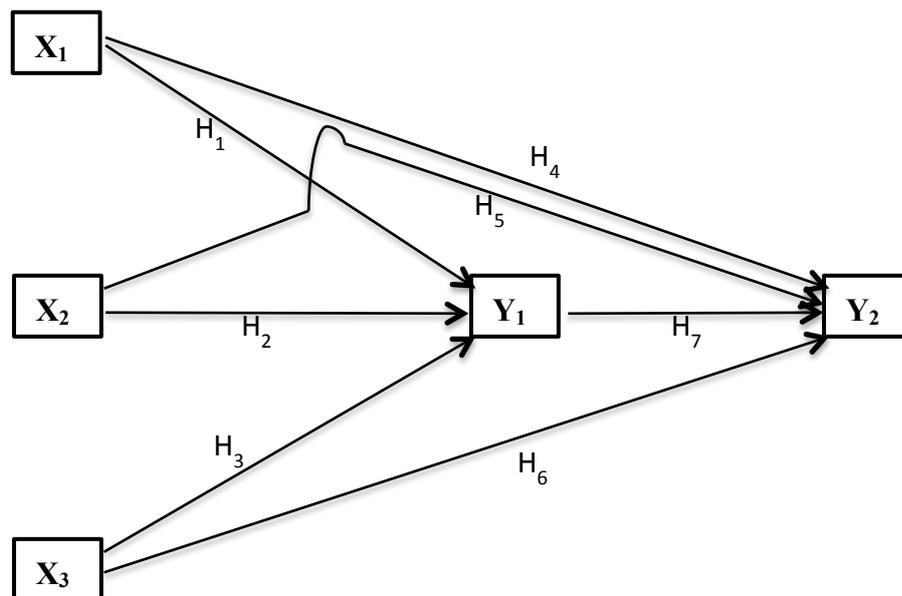
Infrastruktur juga berpengaruh bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, antara lain dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja, serta terwujudnya stabilitas makro ekonomi, yaitu keberlanjutan fiskal, berkembangnya pasar kredit, dan pengaruhnya terhadap pasar tenaga kerja.

Dalam Yanuar (2006) dijelaskan ada dua kendala utama dalam pengadaan infrastruktur. Yang pertama adalah adanya kemungkinan terjadinya kegagalan pasar (*market failure*), dan yang kedua adalah menyangkut aspek pembiayaan. Dalam pengadaan infrastruktur dibutuhkan dana investasi yang besar dan pengadaan infrastruktur merupakan investasi jangka panjang.

Berdasarkan kerangka teoritis tersebut, maka model konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 1 :

Model Konseptual



3. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian menurut tingkat eksplanasi yaitu menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Data yang digunakan adalah data sekunder yang didapat dari Biro Pusat Statistik dan Pusat Data dan Informasi Kementerian Pekerjaan Umum Jakarta, berupa data *times series* dari tahun 2011 sampai dengan 2015, dan data *cross section* yang terdiri dari 33 provinsi, sehingga merupakan data panel atau *pooled data*. Lokasi penelitian mencakup seluruh provinsi yang ada di Indonesia, minus Provinsi Kalimantan Utara.

Hubungan antar variabel :

1. Variabel X_1 , X_2 , dan X_3 merupakan variabel bebas yang bisa mempengaruhi variabel terikat Y_1 dan Y_2 ;
2. Variabel Y_1 merupakan variabel antara (*intervening variable*) yang bisa mempengaruhi Y_2 , tetapi dipengaruhi oleh variabel X_1 , X_2 , dan X_3 ; atau Variabel Y_1 merupakan variabel bebas terhadap Y_2 , tetapi terikat terhadap X_1 , X_2 , dan X_3 ;
3. Variabel Y_2 adalah variabel yang terikat terhadap X_1 , X_2 , X_3 dan Y_1 .

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dan kuantitatif berupa regresi data panel (*Pooled Data*), yang diolah dengan menggunakan aplikasi statistik *Eviews*. Pengujian model dan perhitungan terhadap koefisien jalur terlebih dahulu dilakukan dengan merumuskan hipotesis :

Hipotesis 1 : Apakah X_1 berpengaruh signifikan terhadap Y_1 .

Hipotesis 2 : Apakah X_2 berpengaruh signifikan terhadap Y_1 .

Hipotesis 3 : Apakah X_3 berpengaruh signifikan terhadap Y_1 .

Hipotesis 4 : Apakah X_1 berpengaruh signifikan terhadap Y_2 .

Hipotesis 5 : Apakah X_2 berpengaruh signifikan terhadap Y_2 .

Hipotesis 6 : Apakah X_3 berpengaruh signifikan terhadap Y_2 .

Hipotesis 7 : Apakah Y_1 berpengaruh signifikan terhadap Y_2 .

dan model yang digunakan :

$$\log Y_1 = \alpha_0 + \alpha_1 \log X_1 + \alpha_2 \log X_2 + \alpha_3 \log X_3 + u_i \quad \dots\dots\dots(1)$$

$$\log Y_2 = \beta_0 + \beta_1 \log X_1 + \beta_2 \log X_2 + \beta_3 \log X_3 + \beta_4 \log Y_1 + e_i \quad \dots\dots\dots(2)$$

dimana :

$\log X_1$; $\log X_2$ dan $\log X_3$ = variabel bebas (*independent variable*);

$\log Y_1$ = variabel antara (*intervening variable*);

$\log Y_2$ = variabel terikat (*dependent variable*);

α dan β = koefisien;

$u_i = e_i$ = faktor pengganggu (*stochastic error term*);

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Nilai *R-Square* pada Model 1 sebesar 0,9945 menunjukkan bahwa variabel LOG X_1 , LOG X_2 , dan LOG X_3 , berpengaruh terhadap variabel LOG Y_1 sebesar 99,45 %, atau interpretasi lain dari angka tersebut adalah kemampuan variabel X_1 , X_2 , dan X_3 yang dapat mempengaruhi Tenaga Kerja yang terserap (TKT) adalah sebesar 99,45 %. Sedangkan sisanya 0,55 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat di dalam model ini.

Demikian juga untuk Model 2 tampak nilai *R-Square* sebesar 0,9219 menunjukkan bahwa variabel LOG X_1 , LOG X_2 , LOG X_3 dan LOG Y_1 berpengaruh terhadap variabel LOG Y_2 sebesar 92,19 %, atau interpretasi lain dari angka tersebut adalah kemampuan variabel X_1 , X_2 , X_3 , dan Y_1 yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (PDRB) adalah sebesar 92,19 %. Sedangkan sisanya 7,81 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat didalam model ini.

Koefisien jalur yang merupakan hasil hipotesis dalam penelitian ini disajikan dalam dua persamaan sebagai berikut :

$$\text{Model 1 : } Y_1 = 4,61 + 0,09 X_1 - 0,01 X_2 + 0,07 X_3$$

$$\text{Model 2 : } Y_2 = 0,03 + 0,91 X_1 + 0,09 X_2 - 0,42 X_3 + 0,66 Y_1$$

Tabel 1

Hipotesis	Variabel	Koefisien	t	Prob.	Hasil Pengujian
H ₁	X_1 terhadap Y_1	0,09	5,46	0,00	Signifikan
H ₂	X_2 terhadap Y_1	-0,01	-0,95	0,34	Tidak Signifikan
H ₃	X_3 terhadap Y_1	0,07	2,78	0,00	Signifikan
H ₄	X_1 terhadap Y_2	0,91	10,04	0,00	Signifikan

$\alpha = 5\%$

H ₅	X ₂ terhadap Y ₂	0,09	1,32	0,18	Tidak Signifikan
H ₆	X ₃ terhadap Y ₂	-0,42	-3,14	0,00	Signifikan
H ₇	Y ₁ terhadap Y ₂	0,66	1,93	0,05	Signifikan

Tabel 1 menunjukkan hasil pengujian hipotesis dari masing-masing hubungan antar variabel. Berdasarkan hasil estimasi yang ditunjukkan oleh tabel 1 diatas, tampak bahwa variabel independen yang secara signifikan dapat mempengaruhi tenaga kerja yang terserap dan pertumbuhan ekonomi pada taraf nyata dibawah 1 % adalah X₁, dan X₃. Sedangkan variabel independen X₂ berpengaruh tidak signifikan terhadap Y₁ dan Y₂.

Kemudian dapat juga disimpulkan bahwa : Hipotesis pertama (X₁) berpengaruh signifikan terhadap Y₁ dapat diterima, karena secara statistik terbukti bahwa nilai probabilitasnya $0,00 < (\text{lebih kecil})$ dari standar signifikansi (α) = 0,05. Kemudian koefisien jalur yang bertanda positif bermakna bahwa pengaruh X₁ terhadap Y₁ berjalan searah, artinya semakin besar X₁ dibelanjakan, maka semakin banyak Tenaga Kerja sektor konstruksi/bangunan yang dapat diserap, dan sebaliknya penurunan atau pengurangan anggaran untuk X₁, maka akan dapat mengurangi penyerapan tenaga kerja di sektor konstruksi/bangunan. Faktor penyebabnya karena Bidang Sumber Daya Air cenderung membangun infrastruktur yang mendukung sektor pertanian yang padat karya. Sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Rindang Bangun Prasetyo dan M. Firdaus (2009) bahwa pengeluaran pemerintah termasuk belanja infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap tenaga kerja yang terserap, juga sejalan dengan teori (Sudarsono, 1998), bahwa kesempatan kerja juga menunjukkan permintaan terhadap tenaga kerja karena tersedianya jumlah usaha produksi di sektor pertanian. Sejalan dengan Keynes bahwa kenaikan pengeluaran pemerintah (G) akan mendorong konsumsi (C), dan investasi (I), sehingga akan dapat mendorong peningkatan pendapatan nasional (Y). Sejalan juga dengan teori atau model pertumbuhan ekonomi *Sollow* bahwa pertumbuhan persediaan modal akibat dari belanja infrastruktur, dan tenaga kerja akan berinteraksi dalam perekonomian, yang akan berpengaruh terhadap output barang dan jasa secara keseluruhan. Padmaliana (2015), pertumbuhan neo-klasik dapat diuraikan dalam suatu fungsi produksi *Cobb-Douglas*, dimana output merupakan fungsi dari tenaga kerja dan modal (infrastruktur).

Hipotesis kedua (X_2) berpengaruh tidak signifikan terhadap Y_1 ditolak, karena secara statistik ternyata nilai probabilitasnya $0,34 >$ (lebih besar) dari standar signifikansi (α) 5 %. Koefisien jalur yang bertanda negatif bermakna bahwa pengaruh X_2 terhadap Y_1 bergerak tidak searah, artinya alokasi anggaran atau pengeluaran pemerintah melalui X_2 yang dibelanjakan, tidak menaikkan jumlah tenaga kerja yang terserap. Hal ini disebabkan X_2 banyak menggunakan tenaga mesin atau alat berat untuk belanja proyeknya atau dengan kata lain cenderung padat modal, bukan padat karya.

Hipotesis yang ketiga menyatakan bahwa X_3 berpengaruh signifikan terhadap Y_1 dapat diterima, karena secara statistik terbukti signifikansinya sebesar $0,00 <$ (lebih kecil) dari 0,05. Kemudian koefisien jalur yang bertanda positif bermakna bahwa pengaruh X_3 terhadap Y_1 berjalan searah, artinya semakin besar X_3 dibelanjakan, maka semakin banyak Tenaga Kerja sektor konstruksi/bangunan yang dapat diserap. Sebaliknya, penurunan atau pengurangan anggaran untuk X_3 , maka akan dapat mengurangi penyerapan tenaga kerja di sektor konstruksi/bangunan. Variabel X_3 Sama halnya dengan variable X_1 , belanja infrastruktur pekerjaan umum adalah bagian dari cara membelanjakan barang dan jasa atau konsumsi di masyarakat dan investasi pemerintah berupa sarana publik yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan berupa proyek-proyek pemerintah dengan menyerap kebutuhan tenaga kerja dengan jumlah tertentu. Kenaikan konsumsi (C) dan investasi (I) akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Kemudian bidang Cipta Karya (X_3), cenderung membangun infrastruktur yang berkaitan dengan kesehatan manusia dan lingkungan seperti pengolahan limbah (sampah atau tinja), sistem sanitasi (MCK), jalan dan drainase lingkungan, serta air bersih (mendukung IPM).

Hipotesis yang keempat, keenam, dan ketujuh menyatakan bahwa X_1 , X_3 , dan Y_1 berpengaruh signifikan terhadap Y_2 dapat diterima, karena secara statistik terbukti nilai α nya berturut-turut 0,00, 0,00, dan 0,05 lebih kecil atau sama dengan nilai α standar 5 %. Kemudian koefisien jalur yang bertanda positif untuk X_1 dan Y_1 bermakna bahwa pengaruh X_1 dan Y_1 terhadap Y_2 berjalan searah, artinya pengeluaran pemerintah melalui alokasi anggaran untuk X_1 dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan jumlah tenaga kerja yang terserap juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena tenaga kerja mendapatkan upah sehingga bisa menciptakan kemampuan daya beli di masyarakat (konsumsi). Sejalan dengan teori bahwa belanja pemerintah merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan belanja pemerintah (G) dalam hal ini belanja infrastruktur, dan konsumsi (C) akan dapat meningkatkan permintaan agregat pendapatan nasional. Penyerapan tenaga kerja dari sisi investasi pemerintah ini diharapkan dapat memberikan penghasilan dan menciptakan

kemampuan daya beli masyarakat, ujungnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan penelitian terdahulu oleh A. Maqin (2011), Sari (2009), Novi dkk (2012), Adriani (2003), dan Indah L. Rofiani (2016), bahwa tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah termasuk belanja infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Termasuk apa yang dikatakan oleh Keynes dalam Jhingan (2003: 133-138), bahwa belanja pemerintah (G) termasuk permintaan agregat (AD) yang dapat menstimulan perekonomian melalui kerja publik termasuk belanja infrastruktur pekerjaan umum.

Hipotesis kelima menyatakan bahwa X_2 berpengaruh tidak signifikan terhadap Y_2 , ditolak, karena secara statistik ternyata nilai probabilitasnya 0,18 ($>$) lebih besar dari standar signifikansi $\alpha=0,05$. Kemudian koefisien jalur yang bertanda negatif bermakna bahwa pengaruh X_2 terhadap Y_2 bergerak tidak searah, artinya alokasi anggaran atau pengeluaran pemerintah melalui X_2 yang dibelanjakan berupa belanja proyek ternyata tidak mendukung untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan X_2 masih banyak bersifat padat modal, cenderung lebih banyak menggunakan teknologi dan alat-alat berat atau padat modal. Sejalan dengan Wagner yang menyatakan adanya keterkaitan positif antara pertumbuhan ekonomi dengan besarnya pengeluaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur (Purnomo 2009). Sekalipun dampak yang ditimbulkan dari penyediaan infrastruktur itu masih bersifat jangka panjang. Menurut Todaro dan Smith (2011: 82), infrastruktur jalan dan utilitas dapat memperkecil biaya transportasi dan komunikasi guna memperlancar perdagangan antar wilayah. Sejalan dengan penelitian terdahulu oleh A. Maqin (2011), bahwa dengan tidak lancarnya arus distribusi produksi barang dan jasa, akan dapat menambah biaya produksi sehingga melemahkan daya saing, dan akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan terganggunya arus distribusi barang dan jasa, dan akan menaikkan juga biaya produksi karena adanya penambahan biaya logistik.

5. Simpulan, Rekomendasi dan Keterbatasan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan serta hubungannya dengan tujuan penelitian, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- 1) pengeluaran atau belanja pemerintah melalui belanja modal infrastruktur bidang Sumber Daya Air berpengaruh positif dan signifikan baik terhadap tenaga kerja yang terserap, maupun pertumbuhan ekonomi,
- 2) sebaliknya pengeluaran atau belanja pemerintah melalui belanja modal infrastruktur bidang Bina Marga berpengaruh negatif dan tidak signifikan

terhadap tenaga kerja yang terserap, kemudian berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi,

- 3) sedangkan pengeluaran atau belanja pemerintah melalui belanja modal infrastruktur bidang Cipta Karya, berpengaruh positif dan signifikan terhadap tenaga kerja yang terserap, tetapi negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi,
- 4) kemudian tenaga kerja yang terserap berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
- 5) Belanja modal untuk bidang Bina Marga walaupun relatif lebih besar dan cenderung meningkat dibandingkan bidang Sumber Daya Air dan Cipta Karya, diharapkan kedepannya agar dapat menciptakan *spillover* (limpahan) dari proyek-proyek infrastrukturnya langsung kepada masyarakat.
- 6) Pengeluaran pemerintah melalui pembangunan infrastruktur pekerjaan umum masih sangat diperlukan sebagai langkah awal untuk memperkuat dan mendukung sektor-sektor lain seperti daya saing dan penyerapan tenaga kerja, serta sebagai pendukung arus distribusi barang dan jasa yang harus terintegrasi dengan pusat atau titik pertumbuhan untuk meningkatkan produktivitas nasional.
- 7) Studi ini belumlah mencapai hasil yang optimal, oleh karena itu masih diperlukan lagi studi lanjutan sebagai jawaban atas pertanyaan yang belum memuaskan. Diharapkan studi lanjutan nanti akan dapat mengoptimalkan hasil studi yang telah dilakukan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. 2005. *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*. Graha Ilmu, Jakarta.
- Arsyad, L. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Badan Penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Azis, I. J. 1994. *Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia*. Lembaga Penelitian Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Agustini, Y. 2016. *Pengaruh Investasi PMDN, PMA dan Penyerapan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat*. (Tesis yang tidak dipublikasikan), Magister Ilmu Ekonomi FEB Universitas Tanjungpura, Pontianak.
- Abimanyu, Anggito. 2008. *Kebijakan Fiskal Dalam Pembangunan Pro Rakyat*. Jakarta : Departemen Keuangan.
- Abimanyu, Anggito dan Megantara, Andie. 2009. *Era Baru Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep dan Implementasi*. Jakarta : Kompas.
- Basuki T. A. Dan Prawoto N. 2016. *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis*. PT. RajaGrafindo Persada – Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (BPS) 2011 - 2016. *Susenas Tahun 2016*. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- _____. 2016. *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia*. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (BPS) 2011 - 2015. *Sukernas Tahun 2016*. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2011. *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia*. Agustus 2011. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- _____. 2012. *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia*. Agustus 2012. Badan Pusat Statistik, Jakarta.

_____. 2013. *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia*. Agustus 2013. Badan Pusat Statistik, Jakarta.

_____. 2014. *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia*. Agustus 2014. Badan Pusat Statistik, Jakarta.

_____. 2015. *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia*. Agustus 2015. Badan Pusat Statistik, Jakarta.

Barus, Y. 2011. *Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Perekonomian Wilayah Provinsi Kalimantan Timur: Suatu Analisis Input–Output Antar Wilayah*. (Disertasi), Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Cooray, Arusha, 2009. *Government Expenditure, Governance and Economic Growth*. www.palgrave-journal.com/ces/.

Dahiri, Wibowo, P.S. Adhi. 2016. *Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Indonesia*. Jurnal Budget, Vol.1, No. 2, Jakarta.

Jhingan, M.L. 2000. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Kirmanto, J. 2005. *Prospek Pembangunan Infrastruktur*. Sekolah Tinggi Teknik Sapta Taruna, Jakarta.

Kuncoro, Mudrajat. 2003. *Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah-Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.

Kharisma, Bayu. 2006. *Peran Anggaran Pemerintah Daerah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Sebelum-Sesudah Era Desentralisasi*. [Tesis]. Jakarta : Universitas Indonesia.

Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi. 2015. *Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah*.

Mangkoesebroto, Guritno. 1997. *Ekonomi Publik* Edisi 3. Yogyakarta : BPFE

Mankiw, N.G. 2000. *Macroeconomics*. Fourth Edition. Worth Publishers, New York.

Maryaningsih, N. & Hermansyah, O. & Savitri, M. 2012. *Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Working Paper: Bank Indonesia, Jakarta.

Musgrave, A. Richard dan Musgrave, B. Peggy. 1993, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta : Erlangga.

Yosephina, Maria. 2016. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat*. (Tesis yang tidak dipublikasikan), FEB Universitas Tanjungpura Pontianak.

Pindyck, S. R. dan Rubinfeld, L. D. (2012). *Mikro Ekonomi. / edisi kedelapan*. Erlangga – Jakarta.

Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN). 2013. *Informasi Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2013*. Kementerian PUPR, Jakarta.

_____. 2014. *Informasi Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2014*. Kementerian PUPR, Jakarta.

_____. 2015. *Informasi Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015*. Kementerian PUPR, Jakarta.

Peraturan Menteri PUPR Nomor : 15/PRT/M/2015, tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*

Peraturan Presiden Nomor : 24 Tahun 2010, tentang *Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara*

Rosadi. D. *Ekonometrika & Analisis Runtun Waktu Terapan dengan Eviews*. Andi – Yogyakarta.

Sulistiawati. R. 2012. *Pengaruh Investasi terhadap pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan 2012, Vol. 3, No. 1, 29-50. Universitas Tanjungpura.

Supranto, J. 2012. *Metode Riset. Aplikasi Dalam Pemasaran*. Edisi Ketujuh. Rineka Cipta, Jakarta.

Sukma, F. A. 2015. *Efek Pegganda Infrastruktur Pekerjaan Umum dalam Perekonomian Provinsi Bali*. Balitbang Sosial Ekonomi dan Lingkungan – Balitbang PUPR, Surabaya.

Sirait, R.A, dan Christianingrum, R. 2016. *Pengaruh Belanja Kesehatan Terhadap Angka Harapan Hidup di Kabupaten/Kota Pemekaran Tahun 1999 – 2008 : Analisis Data Panel*. Jurnal Budget, Vol.1, No. 2, Jakarta.

Sukirno, Sadono. 2015. *Pengantar Teori Ekonomi : Makroekonomi*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional : Teori Dan Aplikasi*. Baduose Media, Padang.

Suparmoko, M. 2002. *Ekonomi Publik : Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Edisi Pertama. Andi, Yogyakarta.

Tarigan, R. 2004. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Bumi Aksara, Jakarta.

Tjokoroamidjojo, B. 1993. *Perencanaan Pembangunan*. Haji Masagung, Jakarta.

Todaro, Michael P dan Smith, Stephen C. 2011. *Pembangunan Ekonomi/edisi kesebelas, Jilid 1*. Erlangga – Jakarta.

_____. 2011. *Pembangunan Ekonomi/edisi kesebelas, Jilid 2*. Erlangga – Jakarta.

Word Economic Forum. *The Global Competitiveness Report, 2015-2016*